

TESIS

**PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA UMUM**

OLEH KEJAKSAAN



Oleh:

ROZZYANA NYNDHYA

2210622006

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM OLEH KEJAKSAAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh :

ROZZYANA NYNDHYA

2210622006

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rozzyana Nyndhya

NIM : 2210622006

Tanggal : 05 Juli 2024

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 05 Juli 2024
Yang Menyatakan,



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rozzyana Nyndhya

Nim : 2210622006

Program Studi : Magister Hukum

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksekutif (*Non-Exclusive Royalty Fee Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM OLEH KEJAKSAAN”** beserta perangkat yang ada. Dengan hak bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 05 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

PENGESAHAN TESIS

**PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA UMUM
OLEH KEJAKSAAN**

Disusun dan diajukan oleh :
ROZZYANA NYNDHYA
2210622006

**Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 05 Juli 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan**

Pembimbing I,

Dr. Supardi, SH., MH
NIDN 8890923420

Pembimbing II,

Dr. Handoyo Prasetyo . SH., MH
NIDN 0019126303

Koordinator Program Studi

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, SH., MH.,
M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Dekan,
Dr. Suherman, SH., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 05 Juli 2024

ABSTRAK

Rozzyana Nyndhya, 2210622006, Pidana Tambahan Restitusi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan, Dr. Supardi, SH., MH, Dr. Handoyo Prasetyo. SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana tambahan restitusi yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, serta menganalisis pengaturan yang ideal terhadap tuntutan pidana pengganti berupa restitusi, sehingga terwujud tuntutan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sehingga data dari penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini akan dipaparkan dengan menguraikan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisa dengan metode kuantitatif. Metode studi kepustakaan dimanfaatkan untuk mendapatkan keterangan atau informasi mengenai bagaimana pengaturan restitusi dan pidana pengganti restitusi baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal pada Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan restitusi seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga yang menyelenggarakan penuntutan yaitu Kejaksaan.

Pelaksanaan tuntutan pidana tambahan berupa restitusi dalam peraktek peradilan pidana di Indonesia telah berjalan dan dilaksanakan oleh para Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan restitusi dirasa belum optimal karena adanya kekosongan hukum baik dalam ketentuan pidana yang mengatur restitusi dalam undang-undang maupun dalam peraturan internal Kementerian/Lembaga dalam hal ini peneliti menyorot dari sisi Kejaksaan selaku Lembaga penuntutan.

Dalam contoh kasus yang diambil oleh peneliti baik dalam perkara Mario Dandy maupun dalam perkara Syahril Parlindungan ditemukan penerapan pidana pengganti yang berbeda apabila terdakwa tidak membayar restitusi. Hal tersebut dikarenakan tidak diaturnya pidana pengganti dari restitusi dalam pedoman tuntutan tindak pidana umum, sehingga penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan tidak memiliki tolok ukur dalam mempertimbangkan atau menentukan pidana pengganti yang tepat apabila terdakwa tidak membayar restitusi.

Kata Kunci: *Restitusi, pidana pengganti restitusi.*

ABSTRACT

Rozzyana Nyndhya, 2210622006, Additional Criminal Restitution in the Handling of General Crime Cases by the Prosecutor's Office, Dr. Supardi, SH., MH, Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH.

The implementation of additional criminal charges in the form of restitution in criminal justice training in Indonesia has been carried out and implemented by Ministries/Institutions by their respective authorities. However, in its implementation, the implementation of restitution is considered not optimal because of the legal vacuum both in the criminal provisions governing restitution in the law and in the internal regulations of the Ministry / Institution, in this case, the researcher highlighted from the side of the Prosecutor's Office as the prosecution institution.

In the example of the case taken by the researcher both in the Mario Dandy case and in the Syahril Parlindungan case, it was found that the application of a different substitute crime if the defendant did not pay restitution. This is because there is no regulation for criminal substitutes from restitution in the guidelines for prosecuting general crimes, so that the public prosecutor in preparing the prosecution has no benchmark in considering or determining the appropriate substitute crime if the defendant does not pay restitution. This research is a normative juridical research so the data from this study is obtained from primary legal materials and secondary legal materials.

The legal research approach applied in this study uses a legal research approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study will be presented by describing the data obtained through literature studies analyzed by quantitative methods. The literature study method is used to obtain information or information about how restitution and criminal arrangements instead of restitution are regulated both in laws and regulations internally at the Ministries/Institutions that organize restitution such as the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the institution that organizes prosecutions, namely the Prosecutor's Office.

Keywords: *Restitution, criminal substitute restitution*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan rahmat yang penulis rasakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) Jakarta.

Penulisan tesis yang berjudul **“Pidana Tambahan Restitusi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan”** merupakan penelitian secara yuridis normatif untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana tambahan restitusi yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, serta mengetahui dan menganalisis pengaturan yang ideal terhadap tuntutan pidana pengganti berupa restitusi, sehingga terwujud tuntutan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya khususnya bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia, namun demikian penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun tentunya sangat penulis harapkan.

Sepanjang perjalanan dari awal perkuliahan hingga penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari banyak pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm. selaku rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.,M.Tr.Adm Kes. Selaku Kaprodi Hukum Program Magister Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
4. Dr. Supardi, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing tesis I yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan tesis, serta memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dalam rangka memberikan bimbingan.
5. Dr. Handoyo Prasetyo. SH., MH selaku dosen pembimbing tesis II yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan tesis, serta memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dalam rangka memberikan bimbingan.

6. Seluruh Dosen pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
7. Pegawai staf tata usaha Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. yang telah membantu urusan administrasi selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
8. Ibu Hj. Sulastri Harun (almarhum), Ibu Ida Mardianawati, Bapak Samsunar selaku orang tua yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan dalam perjalanan karir penulis, khususnya pada penyelesaian studi dan penyusunan tesis ini.
9. Vanda Satriadi Pradipta, Shaqueena Akansha Pradipta, Shenina Prameswari Pradipta, suami dan anak-anak dari penulis yang selalu mendampingi, mendoakan, dan menjadi motivasi dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.

Kiranya Allah SWT membalas semua kebaikan dan pertolongan yang telah diberikan. Besar harapan penulis agar tulisan ini memberikan manfaat dalam pelaksanaan dan pengaturan pidana pengganti restitusi oleh Kejaksaan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | 2 |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| ABSTRAK | vi |
| <i>ABSTRACT</i> | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 11 |
| BAB II | 13 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Kajian Teoritis..... | 13 |
| B. Kerangka Pikiran atau Bagan Kerangka Pikir | 18 |
| C. Definisi Operasional..... | 19 |
| BAB III..... | 21 |
| METODE PENELITIAN | 21 |
| A. Tipe dan Pendekatan Penelitian | 21 |
| B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 24 |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 25 |
| D. Analisis Bahan Hukum | 25 |
| BAB IV | 29 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 29 |
| A. Pelaksanaan Tuntutan Pidana Tambahan Restitusi..... | 29 |
| B. Pengaturan Ideal Tuntutan Pidana Pengganti Berupa Restitusi yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan Kemanfaatan..... | 51 |
| BAB V..... | 67 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 67 |

| | | |
|----------------------------|------------------|----|
| A. | Kesimpulan | 67 |
| B. | Saran..... | 69 |
| Daftar Pustaka..... | 71 | |